

Analisis

Kedaulatan Rakyat, 21 Maret 2014

DARI RAKYAT UNTUK (WAKIL) RAKYAT

Wahyudi Kumorotomo

SALAH satu rujukan mengenai makna demokrasi yang paling banyak dikutip adalah yang dikatakan Abraham Lincoln pada tahun 1863, yaitu : government of the people, by the people, and for the people (pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat). Ungkapan pidato Presiden AS di Gettysburg, di atas makam para pahlawan yang melawan perbudakan dan penindasan, itu selanjutnya menjadi adagium yang begitu terkenal di seluruh dunia tentang bagaimana demokrasi harus dijalankan.

Sistem pemerintahan yang dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat adalah makna paling hakiki dari demokrasi. Nuansa dari pemenuhan kehendak rakyat itulah yang mestinya menjadi semangat ritual demokrasi di Indonesia menyambut Pemilu Legislatif 9 April. Pemilu legislatif hendaknya bisa menghadirkan sosok wakil rakyat yang benar-benar peka, peduli dan konsisten mengendalikan kebijakan pemerintah sehingga tetap berada di jalur yang sesuai dengan kemauan rakyat.

Namun melihat berbagai kendala tentang representasi kehendak rakyat melalui pemilu maupun pengalaman selama ini. Melihat sepak-terjang para wakil rakyat dalam periode 2009-2014, tampaknya gagasan mulia tentang anggota legislatif sebagai wakil rakyat belum terpenuhi. Masih begitu banyak anggota DPR, DPD maupun DPRD yang pola kerja dan polanya belum memenuhi harapan rakyat.

Oleh karena itu, menjelang coblosan pemilih sewajarnya bertanya : apakah pemilu ini memang dari rakyat untuk rakyat, ataukah sekadar dari rakyat untuk para wakil rakyat?

Bukan bermaksud menafikan pentingnya pemilu sebagai sebuah mekanisme demokrasi yang telah terlembaga. Bukan pula dimaksudkan untuk mendukung sikap apatisisme dengan menjadi golput. Justru sebaliknya, saya bermaksud untuk mendorong seluruh warga-negara Indonesia yang memiliki hak pilih supaya menyambut pesta demokrasi ini secara serius dan rasional dengan menjadi pemilih cerdas.

Pemilih yang cerdas akan sangat menentukan masa depan demokrasi di Indonesia. Karena dari sinilah ditentukan apakah pemilu bukan sekadar menjadi kegiatan ritual-prosedural, tetapi benar-benar memiliki makna sebagai upaya membentuk pemerintahan

oleh rakyat. Cara mencoblos atau memilih secara serampangan bukan saja akan menghasilkan sosok wakil rakyat yang lebih buruk, tetapi juga akan memperdalam kekecewaan akan proses demokratisasi di Indonesia.

Marilah kita lihat fakta-faktanya. Yang terdapat di dalam daftar calon anggota legislatif Pemilu 2014 ini sebagian besar adalah pemain lama. Sekitar 90% dari caleg adalah mereka yang mencalonkan kembali dan mengincar kursi wakil rakyat melalui pemilu. Untuk tingkat pusat tercatat 507 caleg lama dari total 560 orang anggota DPR mencalonkan diri. Terdapat pula 10 orang menteri yang bertarung untuk kursi legislatif. Calon wakil rakyat yang mencalonkan di daerah juga sebagian besar muka lama yang semestinya sudah diketahui sepak-terjangnya oleh rakyat.

Jika para pemilih tidak ekstra hati-hati dan cermat, bukan mustahil para politisi lama yang kinerjanya buruk itu akan menduduki kursinya kembali dan memperpanjang penderitaan rakyat Indonesia untuk lima tahun ke depan.

Kondisi legislasi yang memprihatinkan itu terjadi di tengah ongkos kebijakan yang semakin mahal. Selama lima tahun berjalan, DPR telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 11,8 triliun. Angka ini lebih besar dibanding dana PNPM Mandiri untuk 37,2 juta orang miskin yang hanya Rp 11,4 triliun. Biaya sebesar itu habis untuk Setjen DPR, kegiatan selama reses, dan studi banding para anggota DPR. Pada masa reses tahun 2014 ini, telah dianggarkan dana sebesar Rp 994,9 miliar yang berarti Rp 1,7 miliar untuk setiap anggotanya.

Untuk mengembalikan daulat rakyat dan mencegah duduknya politisi busuk di jajaran wakil rakyat, tidak ada cara lain kecuali menjadikan ajang pemilu legislatif 2014 ini sebagai proses memilih caleg secara cermat dan cerdas. Pemilih harus pro-aktif untuk mencari informasi tentang rekam-jejak para caleg untuk benar-benar membuat pilihan yang rasional dan tepat. Sudah banyak informasi disediakan oleh KPU/KPUD, website independen, serta jejaring relawan pemilu yang dapat dilihat. Pilihan yang tepat tidak selalu berimpit dengan ideologi, tetapi terkait langsung dengan karakter individu dari para caleg. Masih ada waktu bagi warga untuk mempertimbangkannya sebelum menentukan pilihan di bilik suara

(Wahyudi Kumorotomo. Dosen Fisipol dan MAP-UGM)